



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA MADIUN  
**UNIT KERJA** : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HARIS RAHMANUDIN
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 448030

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.190.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/223 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 810.500.000
2. Tanah Seluas 1429 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. Tanah Seluas 7818 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.250.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 403.500.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, HONDA ASTREA STAR Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
3. MOTOR, HONDA ASTREA STAR Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
5. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
6. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 41.560.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 100.000.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 125.586.217



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.861.146.217
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.861.146.217

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.